

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Penelitian ini, penulis akan membahas literatur yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian. Materi yang akan dibahas adalah supervisi, lingkungan kerja non fisik dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian menggunakan beberapa buku terbitan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan penulis juga menggunakan hasil penelitian yang dianggap tepat.

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti bertujuan sebagai acuan dasar dalam penyusunan penelitian dan bahan perbandingan. Tujuannya agar dapat mengetahui hasil penelitian yang sejenis oleh peneliti terdahulu untuk menjadi gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu guna mendukung penelitian peneliti. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang peneliti gunakan :

#### **1. Bangkit Agung Arif Bangsawan (2022)**

Penelitian yang dilakukan Bangkit Agung Arif Bangsawan (2022) yang berjudul “Analisis Pengawasan Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung”, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan Pemilu pada pengeyenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Bentuk pengawasan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu

dikatakan sudah cukup baik, melalui tahap pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum sesuai Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan kinerjanya didasri dengan Dasar Hukum atau tumpuan yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang-undang tersebut.

## **2. Difa Pramudya (2021)**

Penelitian yang dilakukan oleh Difa Pramudya (2021) yang berjudul “Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang”, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta mensejahterakan rakyat, selain itu dampak negatif untuk masyarakat yaitu kerusakan lingkungan yang tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik. Hasil penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam melakukan pengawasan, minimnya intensitas pengawasan langsung, masih banyak perusahaan yang belum memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3, serta kurangnya kesadaran perusahaan dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

## **3. Wilmar Gusnizar Hermawan (2021)**

Penelitian yang dilakukan wilmar Gusnizar Hermawan (2021) yang berjudul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Dalam Masa Kampanye Pemilu Serentak 2019 Di Provinsi Jawa Barat”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam

Wilayah dengan Kerawanan Sedang Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan Pemilihan (IKP) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia sedangkan jumlah Daftar Pemilihan Tetap cukup banyak sekitar 33.276.815 jiwa pada 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan Bawaslu Jawa Barat sudah melakukan proses pengawasan masa kampanye Pemilu Serentak 2019 dengan baik karena Pengawasan Bawaslu Jawa Barat juga ditunjang oleh perencanaan pengawasan yang telah memiliki standart yang jelas, pengukuran yang tepat, perbandingan yang bertujuan menemukan segala kekurangan serta tindakan-tindakan yang tepat.

#### **4. Nadia Jamali (2019)**

Penelitian yang dilakukan Nadia Jamali (2019) yang berjudul “Pengawasan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pada Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat”, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat khususnya Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengawasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum cukup optimal secara keseluruhan berdasarkan indikator.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik
1.	Bangkit Agung Arif Bangsawan (2022)	Analisis Pengawasan Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	Menurut Donnely (dalam Zuhab, 2001:302)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
2.	Difa Pramudya (2021)	Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang	Menurut (Handoko, 2017)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

3.	Wilmar Gusnizar Hermawan (2021)	Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Dalam Masa Kampanye Pemilu Serentak 2019 Di Provinsi Jawa Barat	Robbins and Coulter	Kualitatif	<i>Historical research</i>	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
4.	Nadia Jamali (2019)	Pengawasan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pada Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Menurut Ulber Silalahi	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

*Sumber : Peneliti, (2024)*

Terdapat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

1. Perbedaan penelitian Bangkit Agung Arif Bangsawan dengan penelitian peneliti ini dapat dilihat dari lokus yang berada pada penelitian ini. Peneliti memiliki lokus di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten

bandung, sedangkan penelitian Bangkit Agung Arif Bangsawan memiliki lokus di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung. Kemudian perbedaan penelitian peneliti ini juga dilihat dari fokus penelitian. Peneliti membahas fokus terkait pegawai bidang pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian Bangkit Agung Arif Bangsawan pengawasan pemilu. Teori penelitian yang digunakan peneliti yaitu dari Manullang (2006:184), sedangkan penelitian Bangkit Agung Arif Bangsawan menggunakan teori dari Donnely (dalam Zuhab, 2001:302). Sementara persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.

2. Perbedaan penelitian Difa Pramudya dengan penelitian peneliti ini dapat dilihat dari lokus yang berada pada penelitian ini. Peneliti memiliki lokus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian Difa Pramudya memiliki lokus di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Kemudian perbedaan penelitian peneliti ini juga dilihat dari fokus penelitian. Peneliti membahas fokus penelitian terkait pengawasan pegawai, sedangkan penelitian Difa Pramudya pengawasan pengelolaan limbah bahan beracun industri. Teori penelitian yang digunakan peneliti yaitu dari Manullang (2006:184), sedangkan penelitian Difa Pramudya menggunakan teori dari (Handoko, 2017). Sementara persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu

pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.

3. Perbedaan penelitian Wilmar Gusnizar Hermawan dengan penelitian peneliti dapat dilihat dari lokus yang berada pada penelitian ini. Peneliti memiliki lokus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian Wilmar Gusnizar Hermawan memiliki lokus di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat. Kemudian perbedaan penelitian peneliti ini juga dilihat dari fokus penelitian. Peneliti membahas fokus terkait pengawasan pegawai, sedangkan penelitian Wilmar Gusnizar Hermawan pengawasan badan pengawas pemilu. Teori yang digunakan peneliti yaitu dari Manullang (2006:184), sedangkan penelitian Wilmar Gusnizar Hermawan menggunakan teori dari Robbins and Coulter. Terakhir metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, sedangkan Wilmar Gusnizar Hermawan *Historical research*. Sementara persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tipe penelitian kualitatif.
4. Perbedaan penelitian Nadia Jamali dengan penelitian peneliti ini dapat dilihat dari lokus yang berada pada penelitian ini. Peneliti memiliki lokus di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bandung, sedangkan penelitian Nadia Jamali memiliki lokus di Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Kemudian perbedaan penelitian peneliti ini juga dilihat dari fokus penelitian. Peneliti membahas fokus terkait pengawasan pegawai, sedangkan penelitian Nadia Jamali pengawasan program peningkatan kesempatan kerja. Teori Teori penelitian yang digunakan peneliti yaitu dari

Manullang (2006:184), sedangkan penelitian Nadia Jamali menggunakan teori dari Ulber Silalahi. Sementara persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik**

Administrasi sendiri didefinisikan atau dapat dijabarkan pemahaman dari administrasi secara sempit diartikan oleh **Silalahi (2016:5)** bahwa :

“Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (clerical work, office work).”

Sementara definisi atau pemahaman administrasi dalam arti luas diartikan oleh **Gie (1980) dalam Silalahi (2016:9)** sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ada di dalam sekelompok orang itu sendiri diartikan oleh **Prof. Dr. Benyamin Harits, M.S dalam bukunya “Teori Organisasi” (2005:57)** sebagai sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi, dan tentunya eksistensi organisasi itu sendiri. **Menurut Elix**

**A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (1977:18) yaitu :**

“Administrasi adalah usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik meliputi seluruh cabang pemerintahan serta merupakan pertalian diantara cabang pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif). Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan publik (public policy) dan merupakan bagian dari proses politik amat berbeda dengan administrasi privat berhubungan erat dengan kelompok kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

**Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) :** Adminitrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi administrasi publik menurut **Roosenbloom (1989:4,5) dalam Suryadi (2007:3) adalah :**

*“Public administration-is the action part of government, the means by which the purpose and goals of government are realized. Public administration sa a field is meanly concern with the means for implenting political values”.*

Sesuai dengan kutipan diatas bahwa administrasi publik dijelaskan sebagai bagian dari aktivitas pemerintah artinya tujuan dan sasaran yang telah ditentnukan pemerintah dapat terealisasikan. Administrasi juga sebagai wilayah kajian yang konsen dengan nilai-nilai implementasi kebijakan politik.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari **Denhardt and Denhardt (2006 : 1)** yang dikutip oleh **Prof. Dr. H. Soleh Suryadi, M.Si** dalam bukunya yang berjudul **“Administrasi Publik dan Otonomi Daerah” (2007 : 5) :**

*“Public administration is concered with the management of public programs. Public administration work at all level of government, both at home and abroad, and they manage non profit organization, associations, and interest groups of all kinds”.*

Dari pemaparan para ahli diatas dapat diketahui bahwa administrasi publik memiliki perhatian atau peduli dengan program-program manajemen publik. Pekerjaan administrator pada semua tingkat pemerintah baik dalam

negeri maupun luar negeri dan mengelola organisasi non profit, asosiasi-asosiasi, dan kelompok penekan lainnya dalam suatu pengelolaannya.

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik menurut para ahli yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa administrasi publik adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat untuk bisa meningkatkan serta memajukan sektor yang berhubungan dengan Negara dan masyarakat secara umumnya.

### **2.1.3 Ruang Lingkup Pengawasan Pegawai**

**R. Terry dalam Manullang (2006:172)** mengemukakan :“Control is to determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”. Selanjutnya **Newman** mengatakan : “Control is assurance that the performance conform to plan”. Demikianlah **Henry Fayol** mengatakan : “Control consist in verifying wheter everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operate in everything, peoples, action”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dari perspektif R. Terry, Newman, dan Henry Fayol, pengertian tentang kontrol dalam konteks manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang mencakup penentuan pencapaian, evaluasi, dan penerapan tindakan korektif untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. R. Terry menekankan langkah-langkah

konkret seperti menilai dan mengoreksi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Newman melihat kontrol sebagai jaminan bahwa kinerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sementara itu, Henry Fayol menyoroti verifikasi kesesuaian dengan rencana, instruksi, dan prinsip yang telah ditetapkan, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan guna memberikan respons dan mencegah terulangnya masalah tersebut. Kesimpulannya, kontrol dalam manajemen melibatkan serangkaian tindakan yang meliputi evaluasi, jaminan kesesuaian, dan verifikasi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan rencana organisasi serta mencegah terjadinya kesalahan berulang. Kontrol beroperasi dalam berbagai aspek, termasuk manusia dan tindakan, sehingga menjadi mekanisme integral dalam mencapai kesuksesan dan konsistensi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mencapai tujuannya dan memegang peranan yang sangat penting karena kehadirannya memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang dapat dihindari sehingga tindakan perbaikan dapat segera diambil. Pengawasan adalah pengamatan terhadap perilaku, aktivitas atau informasi dengan tujuan mengumpulkan, mempengaruhi, mengendalikan atau mengarahkan informasi.

Pemerintah menggunakan pengawasan untuk mengumpulkan inteljen, mencegah kejahatan, melindungi proses, orang, kelompok atau objek atau menyelidiki kejahatan. Hal ini juga digunakan oleh organisasi kriminal untuk mengumpulkan informasi tentang penjahat, pesaing, pemasok atau pelanggan mereka.

Ada beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli sebagai berikut :

**Menurut Handoko (2008:359)**, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan.

**Menurut Handayani (2007:141)**, pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Dari beberapa pengertian pengawasan di atas menurut beberapa ahli, seperti, Handoko, dan Handayani, dapat diartikan sebagai suatu proses kritis dalam manajemen organisasi. Handoko memberikan kontribusi dengan menyatakan bahwa pengawasan adalah proses memantau kegiatan dengan tujuan memastikan bahwa setiap kegiatan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, Handayani menyoroti dimensi kepemimpinan dalam pengawasan. Baginya, pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan berkepentingan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya sekadar pengamatan, tetapi juga melibatkan evaluasi, pemantauan, dan keterlibatan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dengan tujuan memastikan kesesuaian dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran pimpinan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahannya juga menjadi aspek penting dalam memastikan

pencapaian tujuan organisasi. Keseluruhan konsep pengawasan ini menjadi landasan penting untuk memastikan keseluruhan aktivitas organisasi berjalan sejalan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pengertian menurut para ahli yang mencakup mengenai pengawasan dan pegawai sebagai berikut :

**Menurut Winardi (2000:585) :** Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

**Menurut Suharno (2008) :** Pegawai adalah seseorang yang ditugaskan sebagai pekerja dari sebuah perusahaan untuk melakukan operasional perusahaan dia bekerja untuk digaji dan sebagai penggerak utama dari setiap organisasi.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan yakni pengawasan, menurut Winardi (2000), merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer dengan tujuan memastikan bahwa hasil aktual dari pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan sesuai dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks ini, pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol yang dilakukan oleh manajer untuk mengawasi dan menilai capaian sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan secara aktif terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi. Pegawai, menurut Suharno (2008), adalah individu yang diberi tugas sebagai pekerja dalam operasional perusahaan. Pegawai tidak hanya berfokus pada penghasilan gaji, tetapi juga dianggap sebagai penggerak utama dari setiap organisasi. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan

operasional perusahaan dan dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian, pengawasan pegawai dapat diartikan sebagai upaya manajer dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dijalankan oleh pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kerja pegawai sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi, sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pada intinya, pengawasan pegawai merupakan bagian integral dari manajemen untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan kesesuaian dengan rencana dalam pelaksanaan pekerjaan.

Konsep pengawasan menurut **Manullang (2006:184)**, antara lain :

1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas itu baru dapat dilaksanakan bilamana kita mempunyai alat pengukur sesuatu itu. Demikian juga halnya, bila kita mau mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya (tuga-tugasnya) dan bawahan harus mengetahui alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksan pekerjaan.

## 2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Fase kedua, yakni dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) actual result atau hasil pekerjaan bawahan.

## 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, bila pada fase-fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan Tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan.

## 2.2 Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mengetahui pengawasan pegawai yang dimana masih didapati beberapa permasalahan. Penelitian tentang pengawasan pegawai di bidang pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ini akan dianalisis berdasarkan dimensi yang harus dimiliki untuk menjadikan patokan dalam peningkatan pengawasan pegawai tersebut.

Maka dari hal tersebut dapat dilihat dari dimensi yang meliputi tentang konsep pengawasan menurut **Manullang (2006:184)**, antara lain :

1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas itu baru dapat dilaksanakan bilamana kita mempunyai alat pengukur sesuatu itu. Demikian juga halnya, bila kita mau mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya (tuga-tugasnya) dan bawahan harus mengetahui alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksan pekerjaan.

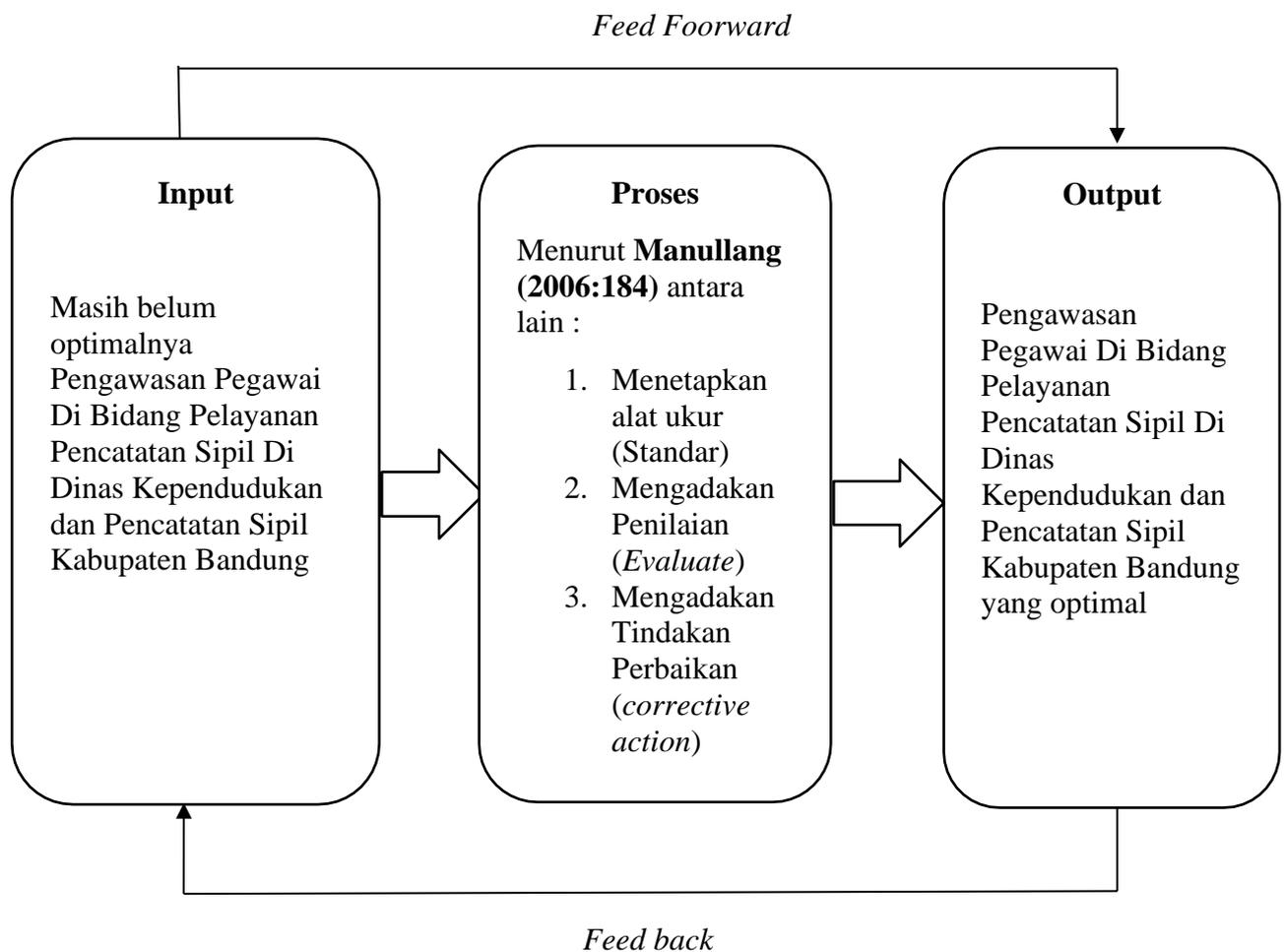
2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) actual result atau hasil pekerjaan bawahan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, bila pada fase-fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan Tindakan perbaikan diartikan,

tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan.



**Gambar 2. 1**

**Kerangka Berfikir Tentang Pengawasan Pegawai**  
*Sumber : Peneliti (2024)*

### 2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan di atas, maka hal yang menjadi proposisi dari penelitian mengenai pengawasan pegawai terkait Pengawasan Pegawai Di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat dijabarkan sebagai berikut : Terciptanya Pengawasan Pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang optimal melalui dimensi pengawasan menurut **Manullang (2006:184)** yaitu : 1) Menetapkan alat ukur (*Standar*), 2) Mengadakan Penilaian (*Evaluate*) dan 3) Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*).

Dengan terealisasikan dimensi tersebut, maka akan terciptanya proses Pengawasan Pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang optimal. Dan dimensi-dimensi yang dianalisis mengenai Pengawasan Pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten telah sesuai dengan melalui 3 (tiga) dimensi yang ditentukan.